

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembagian struktur pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana yang bertujuan agar masing-masing pemerintahan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif. Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam menggerakkan perekonomian daerah beserta mengisi pembangunan didalamnya, terlebih dengan adanya otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Otonomi daerah memberikan ruang yang menempatkan pemerintah daerah harus menunjukkan peran aktif dalam membiayai dan mengatur serta memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki potensi untuk memberikan pemasukan kas pada pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. (Herliene Yudhah Altius, dkk, 2013:105).

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2013 sebesar Rp 2.027.037.384.205,00 sedangkan untuk tahun 2014 sebesar Rp

2.397.918.390.923,00 untuk tahun 2015 sebesar Rp 2.656.920.364.689,88 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp 2.537.879.325.776,76. Peningkatan realisasi penerimaan PAD Provinsi Sumsel tersebut mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Provinsi Sumsel dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan.

PAD menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri dalam upaya menciptakan kemandirian daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, dalam hal ini dibutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif, efektif, dan efisien guna mencapai tujuan daerah yang maksimal (Widi Winarso, 2015: 22).

Pembangunan nasional saat ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pembangunan hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu baik dari dalam maupun luar negeri. Pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disebabkan semakin banyaknya lapangan pekerjaan terbuka, sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya tingkat konsumsi terhadap barang-barang produksi.

Dengan kemudahan pembelian kendaraan bermotor membuat tingkat konsumtif dari masyarakat akan semakin meningkat. Ditambah dengan adanya pembangunan di Indonesia yang masih dalam tahap perluasan, tentu ikut memicu terjadinya dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi ialah kemacetan. Pemerintah daerah pun telah mengambil upaya dengan cara menaikkan tarif pajak untuk kendaraan bermotor, dengan tujuan menekan atau mengurangi daya konsumtif masyarakat dalam hal membeli kendaraan bermotor agar kemacetan yang terjadi bisa berkurang. Berikut adalah tarif yang ditetapkan Pemerintah Sumsel:

Tabel 1.1
Tarif Progresif Yang Ditetapkan Pemerintah

No.	Keterangan	Tarif Pajak
1.	Kepemilikan Kedua	2%
2.	Kepemilikan Ketiga	2,25%
3.	Kepemilikan Keempat dan seterusnya	2,5%

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2011

Setelah ditetapkan pengenaan PKB progresif ini secara umum pemerintah masih tetap tidak mampu menekan angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Kepala Bapenda Sumsel (Muslim), mengatakan bahwa pemberlakuan pajak kendaraan bermotor belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah, terhitung per November 2016 memberlakukan objek pengenaan pajak progresif menasar kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki lebih dari 2 unit kendaraan. Namun kenyataannya pemberlakuan pajak progresif pada kendaraan pribadi diatas 500cc masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan pendataan penduduk dengan E-KTP belum berjalan sebagaimana mestinya (metrotvnews.com/Diakses tanggal 15 April 2017)

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti pajak provinsi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

Pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di masyarakat.

Menurut Muslim, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, PKB dan BBN-KB merupakan salah satu sumber penerimaan

daerah dari sektor PAD yang perlu diintensifkan pemungutannya. Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2016

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2013	646.935.936.628	704.556.680.844
2014	683.799.870.580	723.324.643.993
2015	785.782.561.471	596.462.294.191
2016	847.090.434.266	526.209.192.157

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, 2017

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi untuk penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Provinsi Sumatera Selatan maka diharapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil didapatkan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang, tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Bapenda sebagai potensi pajak, serta adanya peminjaman KTP dan tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBNKB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor periode 2013-2016 dengan menggunakan alat bantu program *SPSS* versi 20.0, dengan mengangkat judul **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan penulis kemukakan yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilihat dari data realisasi jumlah penerimaan PKB perbulan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dilihat dari data realisasi jumlah penerimaan BBN-KB perbulan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari data realisasinya perbulan.
4. Tahun penelitian yaitu tahun 2013-2016.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengatahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti yaitu:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan khususnya mengenai pengelolaan Pajak Daerah. Selain itu, penulis dapat menerapkan mata kuliah yang didapatkan penulis di perkuliahan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan bacaan serta referensi bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi untuk melakukan penulisan berikutnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari penyusunan laporan skripsi dengan mengemukakan teori-teori dan literatur yang mendukung pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu pengertian pajak secara umum, pengertian pajak daerah, fungsi pajak, macam-macam tarif pajak, klasifikasi pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, Masa Pajak Kendaraan Bermotor, Saat Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan

Bermotor, Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Masa Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor, Surat Terutang dan Surat Pemberitahuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pengertian Pendapatan Asli Daerah, kerangka pemikiran, peneliti terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup hasil penelitian dengan melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli daerah berdasarkan landasan teori.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari kesimpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.